
**KEBIJAKAN KOREA SELATAN TERHADAP KOREA UTARA TERKAIT
KASUS PENUTUPAN KAWASAN INDUSTRI KAESONG PADA MASA
PEMERINTAHAN PRESIDEN PARK GEUN HYE**

*South Korean Policy Towards North Korean In The Cases Of Kaesong Industrial
Complex Closure During The Era Of Park Geun-Hye's Leadership*

DINAR TRIANGGITA FERDIANA

20130510073

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

ABSTRACT

Kaesong known as the Industrial areas of two countries with conflict. South Korea and North Korea agreed to open the Kaesong Industrial Complex as the effort for reunification of the Korean peninsula. As the time goes by, the conflict on the Korean Peninsula happens repeatedly and resulted in a disruption of the activities of KIC. Even one of the countries dismisses the activities of KIC as a response to the conflict. This research aims to explain the factors that became the background of why South Korea decided to close the KIC during the era of Park Geun-hye's leadership .

Keywords: Kaesong Industrial Complex, South Korea, North Korea, Park Geun-Hye.

PENDAHULUAN

Kaesong adalah sebuah wilayah yang terletak sekitar 10 kilometer dari seberang perbatasan di Korea Utara. Komplek Industri Kaeseong atau Gaesong merupakan sebuah proyek kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Kawasan industri itu dibuka pada 2004 sebagai simbol kerjasama lintas perbatasan dan rekonsiliasi.¹ Simbol kerjasama ini merupakan bagian dari Reformasi Kebijakan dari Korea Utara oleh Kim Jong-Il (1994-2010) dan Kebijakan *Sunshine Policy* oleh Korea Selatan dibawah kepemimpinan Kim Dae Jung (1998-2003). Proyek kerjasama ekonomi antar Korea ini juga memiliki arti yang penting bagi sejarah Korea karena proyek ini dibuat sebagai puncak dari KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Korea pada tahun 2000 yang untuk pertama kali dilakukan. Yang akhirnya Kim Dae-jung mantan Presiden Korea Selatan dan Kim Jong-il mantan Pemimpin Korea Utara menyepakati dilakukannya kerjasama antar Korea dalam segala bidang baik ekonomi, sosial, budaya, olahraga, dll.² Tujuan dari adanya pembangunan Industri Kaesong ini sendiri sebenarnya adalah untuk mengembangkan kompleks industri di daerah Kaesong Korea Utara dengan penggabungan antara teknologi dan modal dari Korea Selatan dengan Korea Utara agar dapat bersaing dengan produk dari negara lain.

Meskipun kepemimpinan Korsel sudah berganti hingga kini Korsel dibawah kepemimpinan Presiden ke 11 yaitu Presiden Park Geun Hye, Industri Kaesong

¹ Voaindonesia.com, “Korea Selatan Tutup Kawasan Industri Kaesong” diakses pada tanggal 9 November 2016, diakses melalui laman <http://www.voaindonesia.com/a/korea-utara-tutup-kawasan-industri-kaesong/3184674.html>

² Mochtar Mas’oed dan Yang Seung-Yoon. 2005. Memahami politik korea. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press. Halaman 246.

masih tetap dipertahankan menjadi kawasan kerjasama yang menjembatani hubungan dua Negara Korea ini.

Hingga tahun 2013 lebih dari sepuluh tahun beroperasi, KIC mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan juga membangun perekonomian Korea Utara serta menjadi pendorong jalannya Reunifikasi. Namun, seiring berjalannya waktu dengan adanya ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea belakangan ini membuat aktivitas Industri di Kaesong menjadi terganggu. Ketegangan yang terjadi antara kedua Negara ini memuncak setelah adanya keputusan dari Korea Selatan yang memutuskan untuk menghentikan kegiatan dikompleks industri yang dioperasikannya bersama Korea Utara pada 10 Februari 2016.

Adanya penutupan Industri Kaesong yang dilakukan oleh Korea Selatan berdampak besar bagi prospek kegiatan Kompleks Industri Korea. Sikap tegas Korea Selatan tersebut semakin meningkatkan ketegangan antar Korea, memicu kemarahan Korea Utara dalam pernyataan bahwa keputusan yang diambil Korea Selatan merupakan suatu “pernyataan perang”. Meskipun terjadi peningkatan ketegangan, keputusan Korea Selatan menghentikan operasi Kaesong ini tidak diduga, mengingat upaya-upaya reunifikasi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Korea Selatan.

KERANGKA KONSEP

Menurut pemikiran William D.Coplin, Teori pengambilan keputusan Luar Negeri atau Foreign policy, Yaitu :³

³ William D. Coplin. 1992. Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis. Bandung; Sinar Baru. Halaman 30.

“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri :

- a. Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negeri itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk faktor budaya mendasari tingkah laku manusianya.*
- b. Situasi Ekonomi dan Militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadipertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.*
- c. Konteks Internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.”*

Teori William D.Coplin tersebut memang pada fokus penelitian yang diletakkan pada kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer dan konteks Internasional, ketiga faktor tersebut memang sesuai dengan apa yang melandasi munculnya kebijakan Korea Selatan akan penutupan Industri Kaesong. Dengan adanya demo yang dilakukan masyarakat dalam merespon tindakan provokatif korut membuat pemerintah korsel mempertimbangkan langkahnya untuk memberikan sanksi tegas dengan menutup satu-satunya kerjasama diantara mereka, selain itu adanya tindakan provokatif dan pelanggaran perjanjian trust building proses sebagai faktor eksternal membuat Korea Selatan memberikan sanksi tegas sebagai bentuk protes atas uji coba nuklir Korea Utara.

Teori kedua Selain Morgenthau, Jack C Plano dan Roy Olton juga menjabarkan konsep kepentingan nasional. Yang mana kepentingan nasional oleh Jack C. Plano dan Roy Olton diberi batasan sebagai berikut:

“Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan (Decision Making) dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum dan merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi Negara untuk mencakup kelangsungan hidup bangsa dan Negara, kemerdekaan, kemandirian, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi”⁴

Menurut pemikiran dari Jack C. Plano dan Roy Olton, mereka membagi esensi dari kepentingan nasional kedalam 5 pilar utama. Dari 5 pilar yang diuraikan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton faktor keamanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan Korea Selatan dalam kasus penutupan Industri Kaesong. Korea Selatan menggunakan keamanan sebagai alat utama pertahanan negaranya dari ancaman nuklir Korea Utara. Korea Selatan menerapkan kebijakannya dengan menutup industri untuk menjaga dan mewujudkan stabilitas dalam negerinya. Sikap provokasi Korea Utara ini dinilai sebagai pelanggaran isi dari Reunifikasi pada masa Presiden Park yang mengusung tentang Trust-Building Process. Trust Building Process ini merupakan sebuah upaya dari Korea Selatan agar adanya kepercayaan antar kedua Negara tetangga ini tanpa adanya curiga dan ketakutan akan adanya ancaman serangan Nuklir maupun serangan Militer.

Dari adanya gangguan atau ancaman dari negara tetangganya. Korea Selatan mengeluarkan kebijakannya terhadap Korea Utara untuk mempertegas kekuasaan Negaranya dengan menutup Industri Kaesong yang menjadi proyek kerjasama kedua Negara itu. Karena adanya ancaman yang diberikan oleh pihak Korea Utara, hal ini membuat adanya ketegangan di kawasan semenanjung Korea.

⁴ Jack C. Plano dan Roy Olton. 1969. International Relations Dictionary. USA: Rinehart and Wingston, Inc. Halaman 128. Dalam skripsi “Kepentingan Nasional Amerika Serikat Dalam Mempertahankan Proyek Namru-2 Di Indonesia” oleh Nur Hasanah. 2010. FISIPOL. Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halaman 8

Korea Selatan merasa perlu untuk memperkuat dan melindungi Negaranya dan mempertahankan kekuasaannya atas Industri Kaesong. Dengan adanya pelanggaran perjanjian Reuifikasi oleh pihak Korut, dan juga adanya data penyalahgunaan dana dari pihak Korut, Korsel menimbang keputusannya dan akhirnya memutuskan untuk menutup Kawasan Industri yang merupakan sumber pemasukan yang besar bagi pihak Korea Utara.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

KIC dihasilkan dari sebuah inisiatif yang dipimpin oleh Grup Hyundai mulai pada tahun 1998 yang bertepatan dengan kebijakan sunshine policy oleh Republik Korea (ROK) yang berusaha untuk meningkatkan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. KIC terletak sekitar 106 mil sebelah tenggara dari Pyongyang dan 43 mil utara dari Seoul di seberang zona demiliterisasi (DMZ) di DPRK.⁵ Tujuan dari KIC seperti yang dinyatakan oleh Korea Selatan untuk mengembangkan sebuah taman industri di mana bisnis Korea Selatan bisa memproduksi produk yang menggunakan tenaga kerja Korea Utara, memberikan peluang bagi Korea Utara untuk meliberalisasi dan reformasi ekonomi, dan meredakan ketegangan di DMZ. Meskipun dimulai terutama sebagai perusahaan swasta, namun pemerintah sangat terlibat dalam proyek tersebut.⁶ Dengan adanya modal, teknologi, dan juga sumber-sumber alam dari pihak Korea Selatan dan tenaga kerja dari pihak warga Korea Utara, kerjasama ekonomi antar kedua Korea ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Selain

⁵ Dick K. Nanto & Mark E. Manyin. 2011. The Kaesong North-South Korean Industrial Complex. Congressional Research Service. Halaman 6. Diakses melalui laman <https://fas.org/sgp/crs/row/RL34093.pdf> pada 2 Maret 2017.

⁶ Dick K. Nanto & Mark E. Manyin. Op.cit. halaman 6

keuntungan, adanya kerjasama ini juga tentu saja akan menghemat waktu untuk memproduksi barang dan biaya pengangkutannya ke pasar luar negeri seperti ke pasar Negara Rusia, Eropa, Cina, maupun Asia Timur. Apalagi dengan di adakannya kegiatan kerjasama ekonomi antar-Korea ini tentu saja akan sangat berguna untuk memulihkan ekonomi Korea Utara sedang dalam kondisi memburuk.

Melalui KIC, sinergi antara tujuan ekonomi dan politik dibuat. Ada murni tujuan manfaat ekonomis dari keunggulan komparatif serta tujuan politik integrasi bertahap dan transformasi DPRK untuk tujuan akhir dari reunifikasi. Beberapa tujuan anak perusahaan, menurut pengembang KIC, adalah membuat Kaesong hub kerjasama antar-Korea dan SEZ penting di Asia Timur Laut, menghidupkan kembali perekonomian DPRK runtuh, menciptakan lapangan kerja baru bagi warga Korea Utara, membantu DPRK untuk memperoleh teknologi canggih, dan membantu meningkatkan citra diplomatik Korea Utara di masyarakat internasional.⁷

Oleh karena itu, KIC adalah keseimbangan yang baik antara keuntungan ekonomi praktis dan dukungan politik, sementara juga memenuhi kewajiban emosional beberapa warga Korea Selatan untuk membantu "saudara" mereka di Utara. Untuk Utara, KIC juga ditambah dengan kepemimpinannya di bahwa tujuan-tujuan ekonomi memperkuat legitimasi politik Kim Jong-il. Keuntungan dari proyek-proyek ekonomi antar-Korea adalah *major cash cow* bagi rezim Kim.

Tahun 2016, Korea Selatan mengambil langkah tegas untuk memutuskan hubungannya dengan Korea Utara dengan menutup KIC. Penutupan Kawasan Industri Kaesong kembali menjadi isu yang tidak terduga bagi berbagai pihak.

⁷ Sarah Yun. Loc.cit

Penutupan Kaesong ini kembali terjadi seperti pada tahun 2013. Kaesong yang saat itu berhasil dibuka kembali, kemudian mengalami permasalahan yang sama memasuki awal tahun 2016. Penghentian operasi pabrik-pabrik Korsel di kawasan industri Korut di Kaesong itu merupakan sinyal buruk bagi hubungan kedua negara. Kejadian kasus penutupan Kaesong tahun 2016 memang memiliki permasalahan yang sama dengan tahun sebelumnya. Dengan adanya program nuklir Korea Utara yang terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan adanya uji coba nuklir yang tentunya akan terus dilakukan oleh pihak Korea Utara. Korea Utara sendiri melakukan uji coba nuklir pada 6 Januari dan pada 7 Februari dilanjutkan dengan meluncurkan satelit. Dan pada 8 Februari 2016, Korea Utara meluncurkan sebuah roket ke angkasa sebagai uji coba teknologi misil balistik. Peluncuran misil ini bukan kali pertama bagi Korea Utara. Dan dengan adanya peluncuran misil tersebut, Korea Utara telah melakukan pelanggaran konvensi PBB.

Dengan pelanggaran tersebut Korea Utara mendapat sanksi terberat oleh DK PBB. Namun dengan sikap Korea Utara yang tidak jera, Park Geun Hye menetapkan sanksi tegas Korea Selatan untuk Korea Utara sebagai respon atas uji coba nuklir tersebut. Penutupan Kaesong ini merupakan pertamakali oleh Korea Selatan, karena sebelumnya Kaesong merupakan satu-satunya cara bagi Selatan untuk berhubungan dengan Utara. Penutupan KIC memang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor

SITUASI POLITIK DALAM NEGERI

Respon yang diberikan oleh warga Korea Selatan atas ancaman nuklir Korea Utara adalah dengan menyampaikan aspirasi dengan mengadakan demo. Dengan

tindakan Korut yang mengancam keamanan ini, sekitar 150 orang berkumpul di pusat kota Seoul pada Kamis 7 Januari 2016 untuk memprotes uji coba bom hidrogen yang dilakukan oleh Korea Utara. Mereka membakar patung pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dan merobek bendera Korea Utara. Aksi Protes ini sendiri dilakukan juga sebagai bentuk warga Korsel dalam menuntut pemerintah Korea Selatan untuk mengambil langkah lebih tegas terhadap Korea Utara.⁸

TINDAKAN PROVOKATIF KOREA UTARA

Militer Korea Utara merupakan militer yang jauh berbeda peralatannya dengan negara lain, karena diyakini bahwa kemampuan militer dan kesiapan operasional militer Utara berasal dari peralatan yang telah dalam kondisi usang. Dalam kebijakannya, Utara menganut sistem kebijakan sosialis yang mana negara ini mengutamakan militer atas adanya dasar kebijakan atau sungguh ditambah kebijakan byungjin yang di berlakukan pada masa pemerintahan presiden Kim Jong Un ini semakin membuat Utara aktif dalam hal meningkatkan kekuatan serta penelitian dalam pengembangan program nuklir dan rudal. Pengembangan nuklir tersebut selalu di sertai dengan adanya peluncuran rudal balistik yang dilakukan oleh Korea Utara. Pada tahun 2009, 2013, 2014, hingga maret 2015 Korea Utara selalu melakukan uji coba senjata atau rudal balistik yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke negara Jepang. PBB dan negara-negara lainnya sudah mengecam aksi Korea Utara tersebut, dengan memberikan sanksi-sanksi terhadap Korea Utara. Namun, hal ini tidak membuat Korea Utara menghentikan tindakannya. Hampir setiap tahun Korea Utara selalu melakukan tindakan provokatif di wilayah Asia Timur.

⁸ [bbc.com/indonesia](http://www.bbc.com/indonesia), "Protes Warga Korea Selatan terhadap Bom Korea Utara" diakses pada 10 Desember 2016. Melalui laman http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160107_dunia_korsel_korut

Sebulan sebelum penutupan Kaesong, Korea Utara mengklaim telah sukses melakukan tes bom hidrogen pada Januari 2016. Yang mana tes bom hidrogen ini menyebabkan gunung Paekdu meletus. Uji coba tersebut setara dengan gempa berkekuatan 5,1 SR. Hal ini tentunya mengancam keamanan Korea Selatan sebagai negara tetangga Korea Utara. Tindakan provokatif yang berulang kali dilakukan oleh Korea Utara ini selalu mengacu pada provokasi militer bagi Korea Selatan.

Dengan adanya provokasi dan propaganda non militer ke arah Korea Selatan yang terus dilakukan oleh Kim Jong Un. Hal ini memicu ketegangan yang terjadi pada Semenanjung Korea. Untuk mengatasi adanya ancaman yang selalu di timbulkan oleh uji coba Korea Utara ini pada akhirnya kebijakan baru di keluarkan oleh pihak Korea Selatan. Kebijakan tersebut dengan menutup wilayah kerjasama ekonomi diantara kedua negara, hal tersebut diberikan sebagai sanksi atas ancaman yang selama ini dilakukan oleh Korea Utara. Korea Selatan menutup Kaesong yang selama ini memberikan dampak positif bagi pemasukan negara Korea Utara.

PELANGGARAN TRUST BUILDING PROCESS

Pemerintahan Korea Selatan pada masa Park Geun Hye menetapkan suatu kebijakan baru yang mengacu pada kepercayaan. Kebijakan Park Geun Hye tersebut adalah kebijakan “Trust-building process” di Semenanjung Korea yang didukung oleh adanya komitmen yang kuat untuk keamanan, dan dengan memiliki tujuan untuk membangun kepercayaan dalam hubungan antar kedua Korea. *Trust Building Process* di tujukan untuk mengakhiri siklus ketegangan yang sering melanda hubungan di Semenanjung Korea. Banyaknya tindakan provokasi, dan krisis menyebabkan ketidakstabilan dan konfrontasi di Semenanjung Korea. Dan dengan

kebijakan *Trust Building Process* memberikan harapan baru bagi semenanjung Korea untuk mengakhiri krisis serta permasalahan yang ada, selain itu kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong Korea Utara untuk menjadi anggota yang bertanggung jawab dari masyarakat internasional.

Dalam kebijakan tercatat akan adanya konsekuensi tegas yang akan diberikan apabila terjadi ancaman nuklir dan tindakan provokasi. Langkah kebijakan yang dilakukan oleh Korea Selatan ini dengan mengumumkan bahwa Korea Selatan melakukan tindakan tegas untuk menutup Industri Kaesong yang selama lebih dari dua dekade menjadi simbol kerjasama damai di Semenanjung Korea. Sesuai arah kebijakannya, Korea Selatan berupaya untuk melakukan tindakan yang akan membuat program nuklir Korea Utara akan berhenti. Selain itu, penutupan Kaesong ini merupakan akhir dari kerjasama di Semenanjung Korea. Adanya pelanggaran dalam upaya membangun rasa saling percaya yang sebelumnya disetujui oleh kedua negara di Semenanjung Korea, membawa kembali ketegangan hubungan kedua Korea. Provokasi yang selalu dilakukan oleh Korea Utara menjadi faktor berakhirnya kebijakan serta kerjasama yang ada, dan menjadi faktor untuk Korea Selatan dalam memberlakukan kebijakan penutupan Kawasan Industri Kaesong.

Dengan adanya provokasi ini perdamaian di semenanjung Korea hanya menjadi impian belaka. Kaesong yang diharapkan sebagai wadah penghubung kedua negara ini tidak lagi dipertahankan. Sanksi Korea Selatan ini juga merupakan upaya untuk melemahkan program Nuklir Korea Utara. Dengan pemutusan kerjasama tersebut, ketegangan kembali terjadi dalam hubungan di Semenanjung Korea.

TUDUHAN PENGGUNAAN GAJI UNTUK PENGEMBANGAN NUKLIR

Korea Utara sebagai negara yang memiliki dan mengembangkan program nuklir mendapat respon keras dari segala pihak. Namun, dengan adanya respon keras hingga sanksi yang diberikan, hal ini tidak menyurutkan program pengembangan nuklir di Korea Utara. Meskipun sebelumnya Korea Utara mengklaim kepemilikan nuklirnya untuk pengembangan ilmu, namun banyak dari tindakan peluncuran roket missil dari Korea Utara yang memperlihatkan bahwa program nuklir yang dimiliki Korea Utara bukan untuk sebuah ilmu, namun untuk tindakan provokatif yang mengancam keamanan negara lain dilingkup internasional.

Kaesong sendiri membawa keuntungan yang besar bagi perekonomian Utara. Hal ini memang menjadi tujuan awal KIC, yang memang bertujuan untuk memperbaiki ekonomi Utara agar dapat maju dan menjadi lebih baik. Selain itu diharapkan agar perbaikan ekonomi tersebut akan dapat memperbaiki keadaan negara serta kehidupan masyarakat Utara. Menjadi Utara yang terbuka dan lebih maju, serta masyarakat yang sejahtera. Namun, melihat dari keadaan negara serta kehidupan masyarakatnya yang tidak mengalami kemajuan, membuat spekulasi Korea Selatan akan adanya pengalihan dana dari KIC.

Adanya tuduhan Korea Selatan ini disebutkan bahwa tuduhan ini dilandasi oleh laporan dari berbagai sumber yang didapat. Korea Selatan juga melihat dari pembayaran gaji karyawan Korea Utara yang bekerja di Kaesong tidak langsung dibayarkan kepada karyawan tetapi dibayarkan ke pemerintah Korea Utara sebagai perantara dengan alasan awal karena total uang gaji yang telah diberikan Korea Selatan tersebut menggunakan dollar AS dan mereka perlu konversi nilai mata uang asing yang mereka dapat sebelum diberikan kepada para pekerjanya. Jumlah uang

gaji karyawan Kaesong diperkirakan dapat mencapai Rp 6.8 triliun yang seharusnya cukup untuk membangun negaranya dan mensejahterakan rakyat Korea Utara. Dari penghasilan Kaesong inilah, muncul tuduhan adanya 70% dana uang gaji tersebut di simpan oleh pemerintah Utara dan di alih fungsikan, sedangkan buruh atau pekerjanya hanya diberi kupon makanan, bahan pokok kebutuhan, dan mata uang lokal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diberikan.

Dengan bukti yang dibawa oleh Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan mengambil langkah untuk menutup Kawasan Kaesong untuk mengurangi pendapatan Korea Utara, sebagaimana diketahui Kaesong sendiri merupakan proyek penyumbang dana terbesar bagi negara Utara. Dengan harapan penutupan ini akan menutup sumber devisa yang digunakan untuk program pengembangan nuklir, sehingga Utara tidak lagi memiliki dana yang cukup untuk melanjutkan program nuklirnya tersebut.

KESIMPULAN

Dari uraian yang ada, penulis menyampaikan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pengambilan keputusan oleh Korea Selatan untuk menutup kawasan Kaesong. Hal tersebut muncul tidak hanya dari luar melainkan dari dalam negeri. Setidaknya ada 4 faktor yang melatarbelakangi kebijakan Korea Selatan. Faktor tersebut merupakan adanya situasi politik dalam negeri di Korea Selatan. Dan juga adanya faktor eksternal seperti adanya provokasi korea utara, pelanggaran perjanjian reunifikasi, penyalahgunaan dana serta ancaman keamanan oleh korea utara. Meskipun secara pasti adanya penutupan ini juga tentunya merugikan pihak

Selatan, akan tetapi Korea Selatan tetap mempertegas langkahnya untuk tetap menutup KIC sebagai bentuk sanksi tegas merespon tindakan-tindakan provokatif yang selama ini dilakukan oleh Korea Utara yang mengancam keamanan Korea Selatan maupun keamanan dunia luar.



DAFTAR PUSTAKA

- BBCNews, “Protes Warga Korea Selatan terhadap Bom Korea Utara” diakses pada 10 Desember 2016. Melalui laman http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160107_dunia_korsel_korut
- Dick K. Nanto & Mark E. Manyin. 2011. The Kaesong North-South Korean Industrial Complex. Congressional Research Service. Halaman 6. Diakses melalui laman <https://fas.org/sgp/crs/row/RL34093.pdf> pada 2 Maret 2017.
- Nur Hasanah. 2010. “Kepentingan Nasional Amerika Serikat Dalam Mempertahankan Proyek Namru-2 Di Indonesia”. Skripsi. FISIPOL. Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mochtar Mas’oed dan Yang Seung-Yoon. 2005. Memahami politik korea. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Sarah Yun. 2009. Kaesong Industrial Complex: Is It Changing The DPRK? SAIS U.S.-Korea Yearbook Part IV. Diakses melalui laman <http://uskoreainstitute.org/academics/sais-us-korea-yearbook/2009-yearbook/part-iv-north-korea/kaesong-industrial-complex-is-it-changing-the-dprk-by-sarah-yun/>
- Voaindonesia.com, “Korea Selatan Tutup Kawasan Industri Kaesong” diakses pada tanggal 9 November 2016, diakses melalui laman <http://www.voaindonesia.com/a/korea-utara-tutup-kawasan-industri-kaesong/3184674.html>
- William D. Coplin. 1992. Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis. Bandung; Sinar Baru. Halaman 30.